

STATUS KEBERLANJUTAN KUB NELAYAN GILLNET DI BARSELA ACEH BERDASARKAN DIMENSI LEMBAGA DAN KEBIJAKAN

SUSTAINABILITY STATUS COMMUNITY GROUP (KUB) OF GILLNET FISHERMAN IN BARSELA ACEH BASED ON THE DIMENSION OF AGENCIES AND POLICIES

Muhammad Rizal¹, Budy Wiryawan², Sugeng Hari Wisudo², Iin Solihin²,
John Haluan²

¹Jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat. Provinsi
Aceh

²Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor,
Bogor

*Korespondensi: rizalmuhammadfpikutu@gmail.com

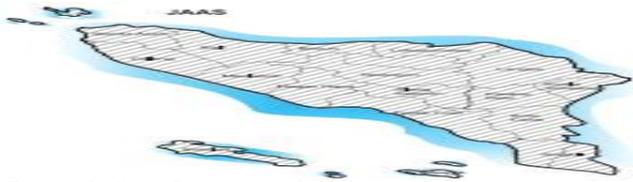
abstract

Perikanan merupakan sektor yang diandalkan untuk pembangunan masa depan Indonesia, pemerintah terus mendorong untuk mencapai hasil maksimal terutama dalam bidang perikanan tangkap. permasalahan mendasar pada nelayan adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan social budaya, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan kelompok. Oleh sebab itu, diperlukan suatu konsep pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pemberdayaan mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (bergaining position) mereka dalam pemanfaatan sumberdaya. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2010-2014 fokus terhadap pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah Barsela Aceh melalui Program pemberdayaan melalui pembentukan KUB yang tergabung dalam PUMP untuk meningkatkan pendapatan, kemandirian dan ekonomi kreatif berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah menganalisis Status keberlanjutan KUB nelayan gillnet di Barsela Aceh. Metode pengambilan data dilakukan secara survei pada KUB nelayan gillnet, data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer melalui Purposive Sampling. Berdasarkan Hasil analisis melalui pendekatan metode Rappfish pada aspek lembaga dan kebijakan memperlihatkan bahwa aspek tersebut memiliki nilai indeks 32,76% dan 47,14% atau kategori kurang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa aspek lembaga dan kebijakan dikategorikan kurang berkelanjutan, atribut yang berpengaruh pada aspek lembaga adalah: kualitas sumberdaya manusia, intensitas pembinaan, efektif PPTK dan tingkat pemanfaatan akses informasi dan aspek kebijakan: peraturan sanksi bagi KUB fiktif, sinkronisasi program pemberdayaan dan aturan sanksi KUB yang melanggar. Dalam Bahasa Inggris

Kata kunci: Keberlanjutan, KUB Nelayan,

I. Pendahuluan

Perikanan merupakan sektor yang diandalkan untuk pembangunan masa depan Indonesia, pemerintah terus mendorong untuk mencapai hasil yang maksimal terutama dalam bidang perikanan tangkap, karena dapat memberikan dampak baik kepada sebagian penduduk indonesia

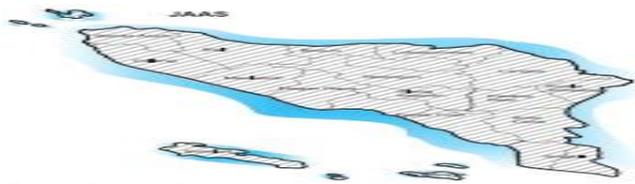


sehingga pemerintah melakukan berbagai macam program pemberdayaan kelompok nelayan dengan tujuan dapat menguatkan ekonomi nelayan dan mempercepat pengentasan kemiskinan (Masrizal, 2012). Hal ini disebabkan karena bidang perikanan memberikan kontribusi terhadap mata pencaharian dan dapat menekan angka kemiskinan, (Barnes *et al.*, 2013). Namun sampai saat ini perekonomian bidang perikanan terutama skala kecil masih berada dalam kondisi yang sangat buruk karena kurangnya daya saing masyarakat perikanan skala kecil menghadapi berbagai ancaman lokal dan global, kerentanan sosial, tekanan terkait resiko pekerjaan, ketahanan pangan, kesejahteraan, dan gaya hidup tradisional masyarakat pesisir serta budayanya (Kittinger, 2013).

Menurut Masrizal (2012), menjelaskan bahwa permasalahan mendasar masyarakat kelautan dan perikanan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan social budaya, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan kelompok. Oleh sebab itu, diperlukan suatu konsep pemberdayaan yang bagus untuk mencapai hasil yang maksimal. Roslinawati (2013), pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sehingga pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Secara fungsional, pemberdayaan masyarakat adalah upaya melegetimasi dan memperkokoh segala bentuk gerakan masyarakat yang ada, gerakan kesejahteraan mandiri masyarakat (Karubaba *et al.*, 2014). Secara umum, pemberdayaan kelompok nelayan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan kultur, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan (Dikrurahman, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, pemberdayaan masyarakat nelayan sangat diperlukan. Pemberdayaan ini diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial dan peningkatan pendapatan yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan posisi tawar (*bergaining position*) mereka dalam pembangunan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pada masa mendatang masyarakat nelayan menjadi subyek pembangunan di daerahnya dan kawasan pesisir memiliki perkembangan ekonomi yang dinamis.

Menyikapi kondisi tersebut diatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2010-2014 fokus terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Babel Aceh yang diwujudkan dalam Program Bantuan Langsung Masyarakat – Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM – PUMP) Perikanan Tangkap sebagai kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Program pemberdayaan melalui pembentukan KUB yang tergabung dalam PUMP harus bisa meningkatkan pendapatan, kemandirian dan ekonomi kreatif berkelanjutan. Tanpa kemandirian akan sulit dicapai kesejahteraan sosial dan aspek yang perlu diperhatikan adalah sisi penyebab kegagalan program pemberdayaan nelayan disebabkan dari isu-isu sosial, ekonomi dan kelembagaan dari institusi (Stanford, *et al.*, 2014). Namun pengaruh faktor-faktor penghambat pemberdayaan kelompok masyarakat atau nelayan tidak selalu sama di semua wilayah, dikarenakan adanya beberapa perbedaan, seperti kondisi wilayah atau lingkungan, waktu, kelompok sasaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat (Dikrurahman, 2013). Oleh sebab itu, Pengembangan pemberdayaan KUB perikanan laut di Barsela Aceh harus dikaji secara komprehensif yang erat hubungannya dengan faktor yang akan membantu KUB dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat keberlanjutan usahanya meliputi; aspek kelembagaan, ekonomi, sosial budaya, ekologi/lingkungan dan kebijakan (aturan). Sehingga dalam penelitian ini sangat perlu melihat tingkat status keberlanjutan KUB nelayan perikanan laut yang berwirausaha dan kemandirian di Barsela Aceh. Tujuan penelitian adalah menganalisis tingkat Status keberlanjutan KUB nelayan *gillnet* di Barsela Aceh.

II. Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berjudul “status keberlanjutan kub nelayan *gillnet* di barsela aceh berdasarkan dimensi lembaga dan kebijakan” di daerah Barsela yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya dan Naganraya.

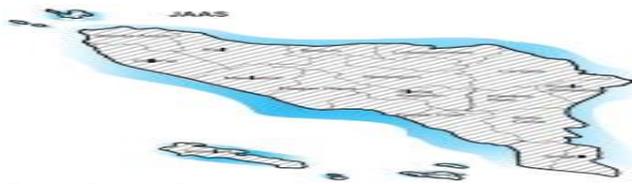
Pengambilan data

Teknik pengambilan data dilakukan secara survei pada KUB nelayan *gillnet*, data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data *primer* melalui *Purposive Sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja pada setiap KUB *gillnet* (Sugiyono, 2007). Data primer dilapangan mengenai persepsi dan status keberlanjutan KUB nelayan *gillnet* di Barsela Aceh dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *focus group discussion* melalui koesioner terhadap 13 KUB nelayan *gillnet* di Barsela Aceh.

Analisis Status Keberlanjutan KUB

Analisis keberlanjutan pengembangan usaha KUB Barsela berbasis perikanan laut dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penentuan atau diskriptor sistem pengembangan usaha KUB secara keberlanjutan yang mencakup 2 dimensi (dimensi kelembagaan dan kebijakan) tahap penelitian setiap atribut dalam skala ordinasi berdasarkan kriteria keberlanjutan setiap dimensi, analisis ordinasi “Rap-SIPEKUB” yang berbasis metode “multidimensional scaling” (MDS), penyusunan indeks dan status keberlanjutan sistem pengembangan usaha KUB yang dikaji baik umum maupun pada setiap dimensi.

Metode yang digunakan dalam melihat keberlanjutan pengembangan KUB di Barsela Aceh harus dapat dijabarkan secara rinci. Menurut IMM (2008), menjelaskan bahwa metode yang dapat digunakan dalam konteks tertentu untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat dalam aktivitas kehidupan manusia adalah Sustainable Livelihoods Approach



(SLA). Melalui MDS ini maka posisi titik keberlanjutan tersebut dapat divisualisasi dalam dua dimensi (sumbu horizontal dan vertikal). Kemudian di dalam penilaian skor dari masing-masing atribut dianalisis secara multi dimensional scaling untuk menentukan satu atau beberapa titik yang mencerminkan posisi keberlanjutan sistem pengembangan usaha KUB berbasis perikanan laut yang dikaji relatif terhadap dua titik acuan yaitu titik “baik” (“good”) dan titik “buruk” (“bad”). Untuk memudahkan ordinasi Rap-SIPEKUB ini menggunakan perangkat lunak modifikasi Rappfish (Kavanagh, 2001). Untuk memproyeksikan titik-titik tersebut pada garis mendatar dilakukan proses rotasi, dengan titik ekstrem “buruk” diberi nilai skor 0% dan titik ekstrem “baik” diberikan nilai skor 100%. Posisi keberlanjutan sistem yang dikaji akan berada di antara dua titik ekstrem tersebut. Nilai ini merupakan nilai indeks keberlanjutan pengembangan usaha KUB berbasis perikanan laut yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) di Barsela.

Skala indeks keberlanjutan pengembangan usaha KUB Barsela berbasis perikanan laut mempunyai selang 0 - 100%. Jika sistem yang dikaji mempunyai nilai indeks lebih dari 50% (>50%) maka sistem tersebut *sustainable* dan sebaliknya jika kurang dari 50% (<50%) maka sistem tersebut belum *sustainable*. Namun demikian dalam penelitian ini ada 4 (empat) kategori status keberlanjutan berdasarkan skala dasar tersebut, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Status keberlanjutan usaha KUB Barsela berdasarkan nilai indeks analisis MDS.

Nilai Indeks	Kategori
0 – 25	Buruk (<i>bad</i>) tidak berkelanjutan
26 – 50	Kurang berkelanjutan
51 – 75	Cukup berkelanjutan
76 – 100	Baik (<i>good</i>) sangat berkelanjutan

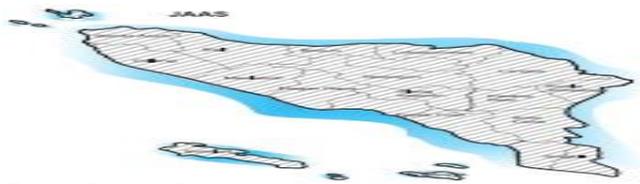
Sumber: Thamrin *et al*, 2007 dan Suyitman *et al*, 2009

III. Hasil dan Pembahasan

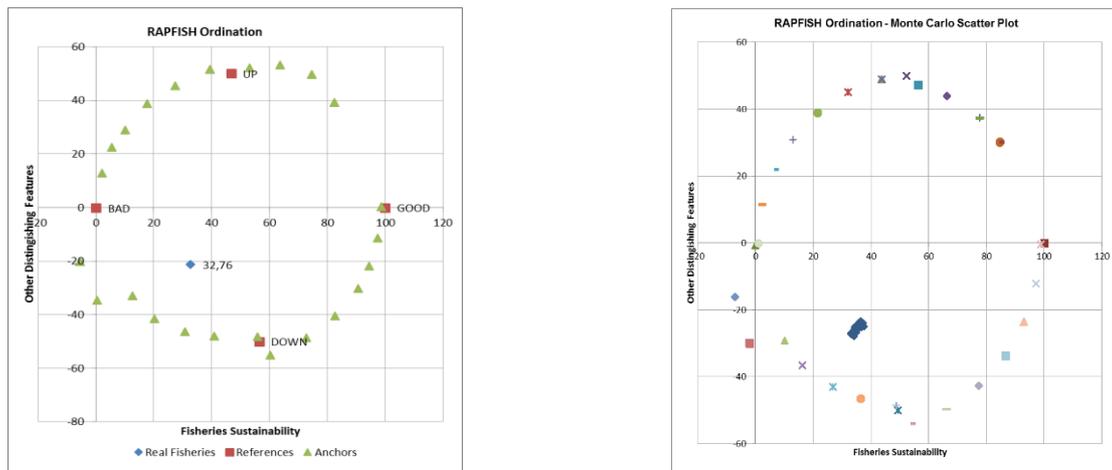
Keberlanjutan dalam penelitian ini dikaji dengan melihat kecenderungan persepsi diantara *stakeholder*. Persamaan pandangan atau persepsi antar *stakeholder* mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas perikanan tangkap kelompok usaha bersama (KUB) nelayan *gillnet* di Barsela Aceh sangat penting untuk mewujudkan bersama dalam mencapai kegiatan KUB yang berkelanjutan. Adapun aspek untuk menilai status keberlanjutan sebagai berikut:

Aspek Lembaga

Berdasarkan hasil analisis aspek lembaga KUB di Barsela Aceh menunjukkan nilai stres = 0,12, R² = 0,93 dengan iterasi 3 kali, memberikan gambaran bahwa hasil penelitian ini baik dan valid untuk digunakan dan diaplikasikan. Indeks dimensi lembaga sebesar 32,76 pada skala 0–100, menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria keberlanjutan, indeks ini berada pada kategori status kurang berkelanjutan. Hal ini mengacu pada pengklasifikasian status yaitu indeks <25 berarti buruk, 26-50 berarti kurang, 50-75 cukup dan >76 baik. Untuk menguji pengaruh dari beragam kekeliruan (ketidakpastian), baik yang berhubungan dengan skoring maupun dalam

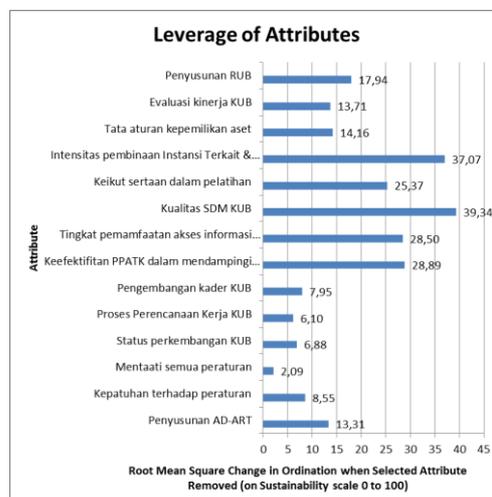
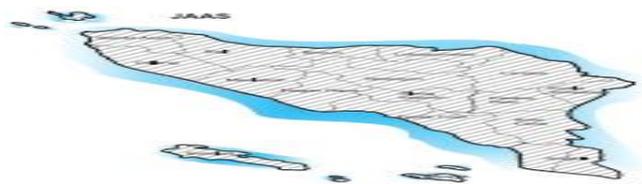


proses ordinasi status keberlanjutan pengelolaan KUB nelayan *gillnet*, maka dilakukan analisis Monte Carlo. Analisis Monte Carlo yang telah diterapkan memperlihatkan hasil grafik pencarian plot yang berjarak dekat atau terfokus pada nilai ordinasi setiap atribut dimensi lembaga. Hal ini menunjukkan kestabilan data atribut dalam analisis yang dilakukan untuk menilai status keberlanjutan KUB aspek lembaga masuk dalam kategori tinggi dengan tingkat gangguan yang kecil. Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 (a) Hasil ordinasi RAPFISH; (b) Analisis scater simulasi Monte Carlo aspek kelembagaan

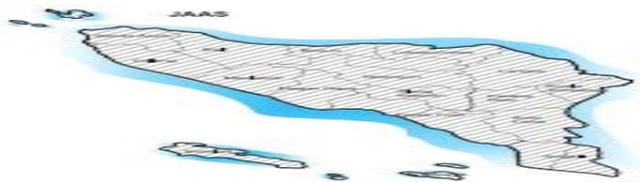
Setelah indeks kondisi aspek lembaga dan status keberlanjutan KUB diketahui, selanjutnya dilakukan analisis leverage (pengungkit) atau sensitifity. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui atribut yang sensitif terhadap indeks kondisi dan status keberlanjutan. Berdasarkan kategorisasi yang dikemukakan oleh Thamrin *et al.*, 2007, dan Suyitman *et al.*, 2009 bahwa status keberlanjutan aspek lembaga KUB berada pada kategori kurang berkelanjutan. Untuk melihat atribut mana yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap nilai indeks keberlanjutan diperlukan *sensitivity analysis (leverage analysis)*. Perhitungan leverage ini didasarkan pada perbedaan standard error antara skor dengan atribut atau sebaliknya skor dengan tidak adanya atribut. Hasil analisis atribut pengungkit (leverage attributes) untuk aspek lembaga ditunjukkan pada Gambar 2. Kemudian setiap indikator yang menjadi faktor pengungkit atau sensitif di aspek lembaga dapat dilihat berikut ini.



Gambar 2 Atribut pengungkit (leverage attributes) RAPFISH aspek lembaga

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa atribut pengungkit (leverage attributes) dalam aspek lembaga adalah partisipasi dan transparansi data anggota (39,33%), intensitas pembinaan (37,07%) dan tata aturan kepemilikan aset (28,88%) dan keefektifan PPTK dalam mendampingi KUB (28,50%). Apabila setiap atribut-atribut tersebut berubah, maka akan berdampak bagi status keberlanjutan pengembangan KUB nelayan khususnya aspek lembaga. Berdasarkan analisis leverage atau sensitifity diperoleh empat atribut yang sensitif berpengaruh terhadap nilai indeks keberlanjutan aspek lembaga, yaitu :

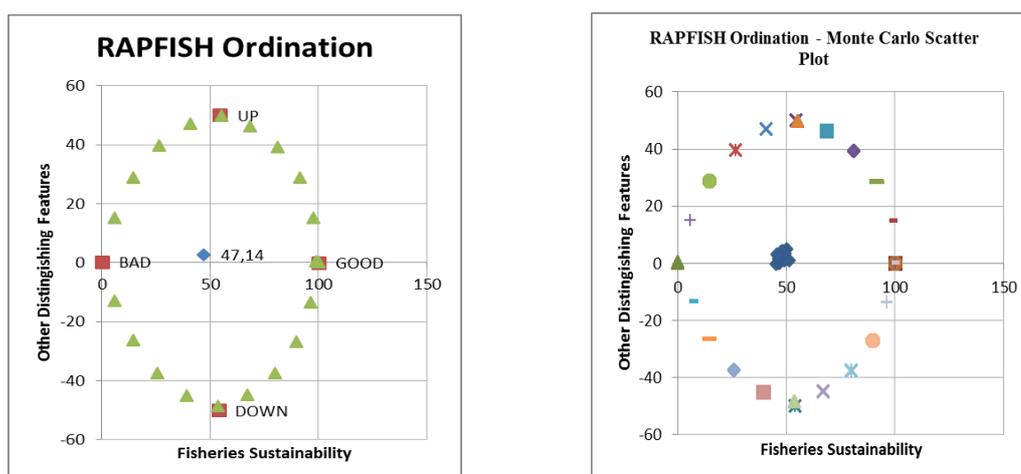
- (1) Kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting untuk melakukan kinerja yang optimal. Kondisi sumber daya KUB nelayan gillnet di Barsela Aceh masih sangat rendah, mereka dominan pendidikan hanya sekolah dasar. Oleh sebab itu, dalam pembangunan pemberdayaan KUB nelayan masih memiliki banyak kendala. Namun jika atribut ini tidak diprioritaskan dalam pembangunan pemberdayaan KUB maka sangat mempengaruhi kinerja nelayan *gillnet* menuju kemandirian, kreatif dan pendapatan.
- (2) Intensitas pembinaan instansi terkait dan lembaga adat, kurang pembinaan dan tidak berkesinambungan penyuluhan yang diberikan kepada para KUB nelayan menyebabkan setiap nelayan kurang efektif dalam melakukan berbagai macam kegiatan penangkapan. Tidak aktifnya intensitas pembinaan kepada KUB sehingga atribut ini sangat mempengaruhi status keberlanjutan aspek lembaga
- (3) Keefektifan PPTK dalam mendampingi KUB, jumlah anggota dan kelompok KUB yang banyak dengan berbagai macam jenis alat tangkap yang digunakan yang tersebar di setiap kecamatan dalam satu kabupaten menyebabkan PPTK kurang efektif melaksanakan tugasnya. Apalagi jumlah PPTK satu orang setiap kabupaten dan tidak tinggal di daerah binaan atau KUB. Hal ini akan sangat mempengaruhi segala aktivitas KUB nelayan dan memberikan efek terhadap status keberlanjutan pengembangan KUB nelayan di Barsela Aceh.



- (4) Pemanfaatan akses informasi, kemajuan teknologi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh nelayan. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa akses informasi berbasis teknologi oleh nelayan sangat rendah. Hal ini membuat nelayan sulit untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal, pemasaran hasil tangkapan dan melakukan negosiasi dengan pihak pengusaha diluar kabupaten setempat. Sehingga pendapatan dan kesejahteraan rendah masih rendah. Kondisi ini salah satu penyebab terhadap keberlanjutan KUB nelayan *gillnet* di Barsela Aceh.

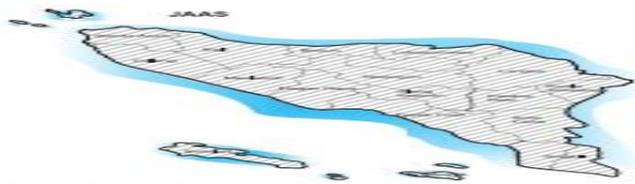
Aspek Kebijakan

Hasil analisis aspek kebijakan yang menunjukkan nilai stres = 0,13, $R^2 = 0,94$ dengan iterasi 2 kali, memberikan gambaran bahwa penelitian ini baik dan valid untuk digunakan dan diaplikasikan dalam keberlanjutan KUB. Nilai indeks (Gambar 3a) sebesar 47,14 pada skala 0–100%, menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria status indeks ini berada pada kategori kurang berkelanjutan. Hal ini mengacu pada pengklasifikasian status yaitu indeks 0-25 berarti buruk, 26-50 kurang, 51-75 cukup dan >76 sangat baik. Untuk menguji pengaruh dari beragam kekeliruan (ketidakpastian), baik yang berhubungan dengan skoring maupun dalam proses ordinasi status keberlanjutan KUB nelayan *gillnet* di Barsela Aceh, maka dilakukan analisis Monte Carlo. Analisis Monte Carlo yang telah diterapkan memperlihatkan hasil grafik pencaran plot yang berjarak dekat atau terfokus pada nilai ordinasi setiap atribut dimensi kelembagaan. Hal ini menunjukkan kestabilan data atribut dalam analisis yang dilakukan untuk menilai status keberlanjutan KUB nelayan *gillnet* di Barsela Aceh masuk dalam kategori tinggi dengan tingkat gangguan yang kecil (Gambar 3b). Lebih jelas tentang status keberlanjutan KUB dapat dilihat pada gambar berikut.



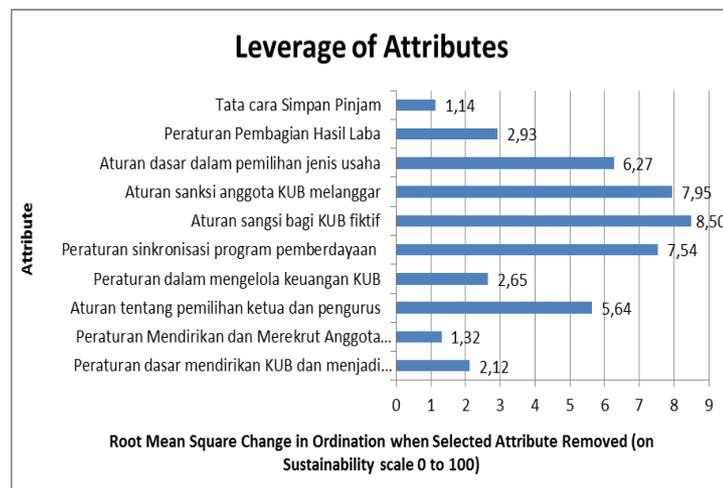
Gambar 3 (a) Hasil ordinasi RAPFISH; (b) Analisis scater simulasi Monte Carlo aspek kebijakan

Kemudian setelah kondisi indeks aspek kebijakan dan status keberlanjutan KUB nelayan



gillnet di Barsela Aceh diketahui, selanjutnya dilakukan analisis leverage (pengungkit) atau analisis sensitivity. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui atribut yang sensitif terhadap indeks kondisi dan status keberlanjutan KUB. Perhitungan leverage ini didasarkan pada perbedaan standard error antara skor dengan atribut atau sebaliknya skor dengan tidak adanya atribut. Hasil nilai leverage menunjukkan tingkat pengaruh atribut terhadap nilai indeks keberlanjutan. Atribut yang mempunyai pengaruh terbesar ditunjukkan dengan nilai leverage yang terbesar begitu sebaliknya atribut dengan nilai leverage terkecil mempunyai pengaruh yang kecil pula terhadap nilai indeks keberlanjutan (Novita *et al*, 2012).

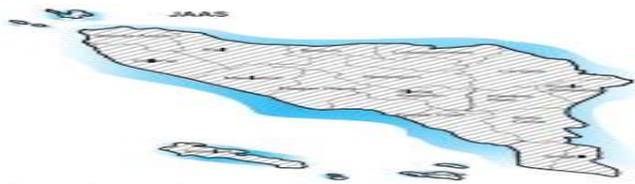
Untuk lebih tentang atribut nilai leverage dalam status keberlanjutan aspek kebijakan dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 4 Atribut pengungkit (leverage attributes) RAPFISH aspek kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa indikator yang menjadi faktor pengungkit atau sensitivity aspek kebijakan adalah aturan sanksi bagi KUB fiktif dengan nilai atribut 8,50% dan sinkronisasi program pemberdayaan nelayan dengan nilai atribut 3,28%. Kondisi seperti ini dilapangan menunjukkan bahwa akan berdampak bagi keberlanjutan KUB nelayan *gillnet* khususnya aspek kebijakan. Setiap perubahan pada atribut-atribut tersebut akan berdampak besar pada nilai indeks keberlanjutan aspek sosial budaya KUB nelayan di Barsela Aceh, yaitu:

- (1) Aturan sanksi bagi KUB fiktif, implimentasi aturan sangat kurang dilapangan menyebabkan ada KUB yang fiktif. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem kontrol pemerintah. selama ini dilapangan banyak KUB setelah mendapat bantuan dari pemerintah tetapi tidak ada aktivitas secara *continue*. Aturan sanksi bagi KUB fiktif yang belum ada atau tidak diterapkan. Hal ini sangat mempengaruhi dalam tingkat keberlanjutan KUB. Sehingga program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan KUB nelayan di Barsela Aceh gagal terlaksana dengan baik.
- (2) Aturan sanksi anggota KUB melanggar, aturan sanksi ini berdasarkan existing menunjukkan kurang efektif. Hal ini membuat KUB tidak ada tanggung jawab dalam setiap

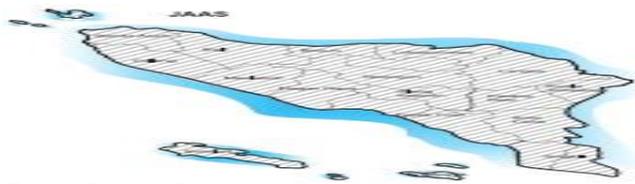


kegiatan yang dilaksanakannya. Sehingga setiap KUB tidak ada beban dalam melakukan setiap pelanggaran. Salah satu contoh adalah KUB setelah mendapatkan bantuan untuk mendukung kinerja KUB, tetapi kenyataan dilapangan bahwa bantuan yang diperoleh tidak dipergunakan untuk membantu aktivitas kinerja melautnya dan masih terjadi sampai saat ini. Kondisi ini membuat kinerja KUB tidak efektif, mandiri, kreatif dan sulit mencapai kesejahteraan.

- (3) Sinkronisasi program pemberdayaan, Banyak sekali Program Pemberdayaan yang dilaksanakan di daerah Barsela (Barat Selatan) Aceh memiliki program yang sama, cuma dengan sumber anggaran yang berbeda seperti program bantuan alat tangkap, armada kapal, alat bantu penangkapan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Hal ini menyebabkan pola pikir nelayan sulit berubah untuk menjadikan usahanya lebih mandiri karena bantuan dari instansi-instansi tersebut yang menggunakan anggaran APBN, APBA, APBD, OTSUS dan dana aspirasi akan dibagikan setiap tahun. Kemudian ada lagi bantuan berasal dari berbagai macam Departemen, LSM dan Swasta dengan agenda pemberdayaan masyarakat, namun tidak ada upaya untuk melakukan sinkronisasi, sehingga program yang telah dilaksanakan tidak memberi dampak yang optimal dan nelayan tetap pada lingkaran kemiskinan.

Pembahasan

Berdasarkan Hasil analisis status berkelanjutan KUB nelayan di Barsela Aceh menurut pendekatan metode Rappfish terhadap aspek lembaga dan kebijakan memperlihatkan bahwa aspek tersebut memiliki nilai indeks 32,76% dan 47,14% atau kategori kurang berkelanjutan dari aspek lembaga dibandingkan aspek kebijakan dengan status cukup berkelanjutan. Nilai R^2 dari kedua aspek keberlanjutan KUB nelayan *gillnet* berada pada selang kepercayaan 95% berada di antara 93,36% hingga 95,23%. Nilai ini tergolong tinggi dan berarti tingkat kepercayaan terhadap analisis data yang ada (atribut pada aspek) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jumlah iterasi menyatakan pengulangan perhitungan, dimana masing-masing aspek keberlanjutan pengembangan KUB nelayan *gillnet* sebanyak 2-3 kali pada metode Rappfish. Iterasi atau pengulangan perhitungan diterapkan pada masing-masing aspek untuk melihat pengaruh kesalahan pembuatan skor pada setiap atribut maupun kesalahan prosedur yang berakibat pada jarak titik referensi. Jumlah iterasi ini dapat juga dikatakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari indeks keberlanjutan pengembangan KUB nelayan yang telah diperoleh. Menurut Fauzi dan Anna (2005), hal yang perlu diperhatikan dalam teori Rappfish adalah aspek ketidakpastian. Hal ini merupakan dampak dari kesalahan skoring akibat minimnya informasi, dampak dari keragaman dalam skoring akibat perbedaan penilaian, kesalahan dalam data entry dan tingginya nilai stress yang diperoleh dari algoritma ALSCAL. Untuk melihat masalah ketidakpastian, maka digunakan teknik analisis Monte Carlo yang merupakan metode simulasi untuk mengkaji pengaruh kesalahan perhitungan maupun kesalahan penilaian terhadap atribut oleh informan serta mengevaluasi dampak kesalahan acak (random error) terhadap seluruh aspek. Apabila selisih antara indeks keberlanjutan Monte Carlo dengan indeks keberlanjutan MDS

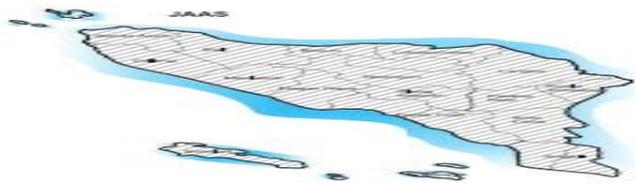


kurang dari 1 hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kesalahan dalam analisis adalah kecil (Kavanagh,2001). Hasil Rappfish secara keseluruhan menggambarkan kondisi umum berdasarkan analisis penilaian atas atribut-atribut yang digunakan pada masing-masing aspek dalam keberlanjutan pengembangan KUB nelayan *gillnet*, sehingga diketahui atribut paling sensitif yang dapat memengaruhi keberlanjutan pengembangan pada setiap aspek. Oleh karena itu diperlukan analisis sensitivitas atau analisis leverage. Analisis leverage ini dilakukan untuk melihat pengaruh setiap aspek terhadap skor keberlanjutan, sehingga bisa dilihat tingkat sensitivitas skor keberlanjutan dari aspek tersebut yang dapat berpengaruh aspek kelembagaannya. Hasil analisis leverage pada aspek lembaga, ekonomi dan sosial budaya menjelaskan dengan atribut kualitas sumberdaya manusia, etos kerja, dan tingkat peluang pasar merupakan atribut yang memiliki persentase sangat berpengaruh dalam keberlanjutan pengembangan KUB nelayan *gillnet* di Barsela Aceh dibandingkan dengan atribut lainnya.

Kualitas sumberdaya manusia merupakan atribut yang sangat sulit untuk dilakukan, sehingga butuh waktu untuk mencapai target tersebut. Merubah mindset para KUB nelayan untuk bangkit dan pengembangan dirinya dalam upaya meningkat dan pengelola KUB menuju usaha yang kreatif, maju dan kemandirian. Realita ini terjadi kualitas sumber daya manusia atau nelayan masih rendah. Munawwaroh (2013) mengatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM diantaranya variabel anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, tingkat pendidikan dan perekonomian berpengaruh signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Sehingga peningkatan pada semua variabel tersebut dapat meningkatkan kualitas dari SDM.

Kemudian berdasarkan aspek kebijakan dalam melihat status keberlanjutan KUB nelayan aspek yang paling berpengaruh adalah aturan atau kebijakan tentang sanksi bagi KUB fiktif. Aturan ini sangat penting supaya KUB memiliki komitmen yang tinggi untuk memanfaatkan setiap bantuan yang diperoleh dari pemerintah dalam melakukan usaha penangkapan ikan oleh KUB. Tidak aktif sanksi bagi setiap KUB saat ini menjadi faktor yang sangat mempengaruhi status keberlanjutan KUB tersebut, sehingga aturan ini sangat penting untuk dapat mengaktifkan atau memberi dorongan kepada KUB yang telah mendapatkan bantuan untuk aktif melakukan penangkapan ikan sehingga dapat memperoleh pendapatan dan menciptakan kemandirian secara terus menerus serta membantu pemerintah dalam upaya program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan.

Atribut berikutnya adalah sinkronisasi program pemberdayaan, masalah dasar dalam pengentasan kemiskinan setiap departemen pemerintah, pimpinan pusat-daerah dan lembaga swasta memiliki program yang sama. Sehingga sampai saat ini belum ada kebijakan atau aturan yang mengatur untuk sinkronisasi program pemberdayaan KUB yang usulannya dari nelayan berdasarkan kebutuhan dan harapannya. Oleh sebab itu, semua program pemberdayaan nelayan tersebut tidak dapat mensejahterakan dan kemandirian nelayan, malah sebaliknya nelayan akan terpuruk dan tetap pada lingkaran kemiskinan.

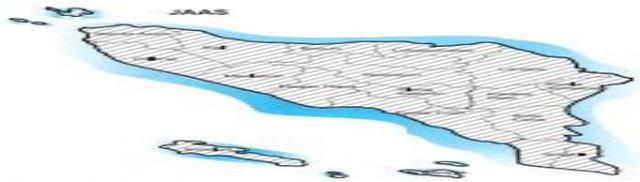


IV. Kesimpulan

Status berkelanjutan KUB menunjukkan bahwa menurut aspek lembaga, dan kebijakan dikategorikan kurang berkelanjutan. Atribut yang berpengaruh pada aspek lembaga adalah: kualitas sumberdaya manusia, intensitas pembinaan, efektif PPTK dan tingkat pemanfaatan akses informasi. Serta aspek kebijakan: peraturan sanksi bagi KUB fiktif, sinkronisasi program pemberdayaan nelayan dan aturan sanksi KUB yang melanggar

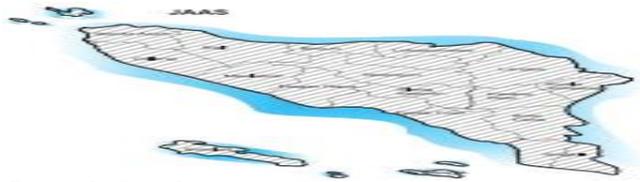
Daftar Pustaka

- Barnes, M.M., Kirsten L.L., Olesona, Zafindrasilivononac, B. (2013). The Total Economic Value of Small-Scale Fisheries with Acharacterization of Post-Landing Trends: an Application in Madagascarwith Global Relevance. *Fisheries Research* 147: 175– 185.
- Dikrurahman dan Sofhani TF. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kelompok Nelayan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus: Kelompok Nelayan Di Pulau Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam). *Jurnal Perencanaan Wilayah*. 1 (1): 35-44.
- IMM. 2008. Sustainable Livelihoods Enhancement and Diversification (SLED): A Manual for Practitioners. IUCN, Gland, Switzerland and Colombo, Sri Lanka; CORDIO, Kalmar, Sweden; and ICRAN, Cambridge, UK.
- Karubaba O, Purwanti F, Suprpto D. 2014. .Evaluation of Coastal Community Empowerment Program in the Sarawandori Village Kosiwo Yapen Island Regency, Papua Province. *Management Of Aquatic Resources*.3 (4): 119-124.
- Kavanagh. P. 2001. Rapid Appraisal Of Fisheries (Rapfish) project. Rapfish Software Description. University of british Columbia.
- Kittinger, J N. 2013. Human Dimensions of Small-Scale and Traditional Fisheries in the Asia-Pacific Region. *Pacific Science*, 67(3):315-325.
- Masrizal. 2012. Kajian Yang Harus Dipelajari Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal lingkungan hidup*.
- Munawwaroh. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Sumber daya Manusia dan Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Kajian Ekonomi*. 2(03):136-155
- Novita, E., Suryaningrat, Andriani, I., & Widyotomo, S. (2012). Analisis keberlanjutan kawasan usaha perkebunan kopi (KUPK) rakyat di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. *Jurnal Teknologi Pertanian Agritech*. 32 (2): 126- 135.
- Roslinawati. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kabupaten Donggala. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*. 5(2): 1110-1117.
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung (ID): CV ALFABETA.
- Stanford R J, Budy wiryawan A, Dietriech bengen A, Rudi febriamansyah B, John haluan. 2014. A Improving Livelihoods In Fishing Communities Of West Sumatra. *Marine Policy*. 45 (2014):16–25.
- Suyitman, S.H. Sutjahjo, Herison,C., dan Bihan, S. 2009. Status Keberlanjutan Wilayah Berbasis



Peternakan Di Kabupaten Situbondo Untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan. *Jurnal Agro Ekonomi*. 27 (2): 165-191

Thamrin, S. H. Sutjahjo, C. Herison, dan S. Biham. .2007. Analisis Keberlanjutan Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia Untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan : Studi kasus Kecamatan Bengkayang (Dekat Perbatasan Kabupaten Bengkayang). *Jurnal Agro Ekonomi*. 25 (2): 103-124.



- Buller H, Hoggart K. 1994a. New drugs for acute respiratory distress syndrome. *New England J Med* 337(6): 435-439.
- Buller H, Hoggart K. 1994b. The social integration of British home owners into rench rural communities. *J Rural Studies* 10(2):197–210.
- Dower M. 1977. Planning aspects of second homes. di dalam Coppock JT (ed.), *SecondHomes: Curse or Blessing?* Oxford: Pergamon Pr. Hlm 210–237.
- Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. *Marijuana: the Forbidden Medicine*. London: Yale Univ Press.
- Palmer FR. 1986. *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge Univ Press.